

**DAMPAK PEMANFAATAN UANG GANTI RUGI
PENGADAAN TANAH JALAN TOL CIBITUNG –
CILINCING TERHADAP KONDISI SOSIAL EKONOMI
PIHAK YANG BERHAK
(Studi di Desa Bunibakti Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Syarat Untuk Memperoleh
Sebutan Sarjana Terapan di Bidang Pertanahan
Pada Program Studi Diploma IV Pertanahan



Disusun Oleh :

Rahmat Taufik Mauladana Utama
20293471

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
YOGYAKARTA
2024**

ABSTRACT

Indonesia is currently aggressively carrying out development in various fields, both physical and non-physical. These development efforts require land as a medium that covers all aspects of human life. The government realizes that land acquisition and development will never end. Land acquisition that provides compensation must be able to ensure that the socio-economic welfare of the community is no worse than the situation before the land is used by other parties. This study aims to analyze the utilization of land acquisition compensation money in the construction of the Cibitung - Cilincing Toll Road on the socio-economic conditions of the entitled parties in Bunibakti Village, Babelan District, Bekasi Regency. This research uses a qualitative method with a descriptive approach. The formulation of the problem raised is how the use of compensation money by the entitled parties, as well as how the impact on changes in their socio-economic conditions. The results showed that the majority of the entitled parties utilized the compensation money for productive purposes, such as the purchase of agricultural land, construction of new houses, and opening new businesses. Others used it for consumptive purposes, such as house repairs, vehicle purchases, and Hajj or Umrah travel expenses. The socioeconomic impacts seen in employment, education, income, and property ownership include changes in employment, increased ability to finance children's education, changes in income, and increased property ownership. Some informants experienced job changes from farmers to self-employed or traders, while others no longer work. Increased income occurred for those who used the compensation money as capital for new businesses or the development of existing businesses. Increases also occurred in the ownership of property, vehicles and electronic equipment. Thus, productive use of compensation money can have a positive impact on improving the socio-economic conditions of eligible parties, although further attention is needed to ensure the long-term benefits of the compensation money received.

Keywords: Money Utilization, Compensation Money, Socio-Economic Condition.

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|---|---------|
| HALAMAN PENGESAHAN..... | ii |
| PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI..... | iii |
| KATA PENGANTAR | iv |
| ABSTRACT..... | vii |
| INTISARI | viii |
| DAFTAR ISI..... | ix |
| DAFTAR TABEL..... | xi |
| DAFTAR GAMBAR | xii |
| DAFTAR LAMPIRAN..... | xiii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Perumusan Masalah | 3 |
| C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian | 4 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... | 6 |
| A. Kajian Terdahulu..... | 6 |
| B. Kerangka Teoritis..... | 9 |
| 1. Dampak | 9 |
| 2. Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Jalan Tol | 10 |
| 3. Ganti Rugi dalam Pengadaan Tanah | 13 |
| 4. Pemanfaatan Uang Ganti Rugi | 16 |
| 5. Kondisi Sosial Ekonomi..... | 18 |
| 6. Pihak Yang Berhak..... | 20 |
| C. Kerangka Pemikiran..... | 21 |
| D. Petanyaan penelitian..... | 23 |
| BAB III METODE PENELITIAN..... | 24 |
| A. Format Penelitian | 24 |
| B. Lokasi Penelitian | 24 |
| C. Informan Penelitian | 25 |
| D. Jenis, Sumber, dan Teknik Pengumpulan Data..... | 25 |
| 1. Data Primer..... | 25 |
| 2. Data Sekunder | 26 |
| 3. Teknik Pengumpulan Data | 26 |
| 4. Teknik Analisis Data | 27 |
| BAB IV GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN | 30 |
| A. Gambaran Umum Desa Bunibakti Kecamatan Babelan | 30 |
| 1. Profil Desa Bunibakti | 30 |

| | |
|---|-----------|
| 2. Keadaan Demografi..... | 32 |
| BAB V PEMANFAATAN UANG GANTI RUGI..... | 36 |
| A. Uang Ganti Rugi | 36 |
| B. Pemanfaatan tujuan Konsumtif | 41 |
| C. Pemanfaatan tujuan Produktif | 43 |
| BAB VI DAMPAK PEMANFAATAN UANG GANTI RUGI TERHADAP PERUBAHAN KONDISI SOSIAL EKONOMI PIHAK YANG BERHAK..... | 46 |
| A. Kondisi Sosial Pihak Yang Berhak | 46 |
| 1. Pendidikan | 46 |
| B. Kondisi Ekonomi Pihak Yang Berhak | 54 |
| 1. Mata Pencaharian | 54 |
| 2. Pendapatan..... | 61 |
| 3. Kepemilikan Harta Benda | 66 |
| BAB VII PENUTUP..... | 71 |
| A. Kesimpulan | 71 |
| B. Saran..... | 72 |
| DAFTAR PUSTAKA | 73 |
| LAMPIRAN..... | 76 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia saat ini sedang gencar melakukan pembangunan di berbagai bidang baik fisik maupun non-fisik. Upaya pembangunan tersebut membutuhkan tanah sebagai media yang mencakup seluruh aspek kehidupan manusia. Hal ini dikarenakan tanah tidak hanya memiliki nilai ekonomi dan kesejahteraan tetapi juga mencakup aspek sosial, budaya, dan psikologis.

Pengadaan tanah untuk kepentingan umum di Indonesia, yang dilakukan melalui pelepasan hak atas tanah sering kali menimbulkan masalah, misal terbatasnya ketersediaan tanah untuk mendukung pembangunan. Permasalahan lainnya yang akan timbul yaitu saat pelaksanaan tahap ganti rugi pasca pelepasan tanah dimana kebanyakan masyarakat memilih ganti rugi berupa uang. Salah satu contohnya pada saat pengadaan tanah pembangunan Jalan Tol Surabaya-Mojokerto dimana pihak yang berhak atas objek pengadaan tanah jalan tol telah menerima ganti rugi setelah kehilangan rumah dan tanah mereka akan tetapi masyarakat belum merasakan peningkatan yang signifikan dalam standar hidup mereka. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat harus menyesuaikan diri dengan perubahan kondisi sosial dan ekonomi. Demikian pula halnya dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang terkena dampak pembebasan tanah untuk jalan tol yang mengalami perubahan selama proses pengadaan tanah Jalan Tol Cibitung-Cilincing.

Jalan Tol Cibitung – Cilincing atau disingkat menjadi JTCC merupakan salah satu upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, khususnya di wilayah perkotaan dan daerah sekitarnya. Jakarta adalah salah satu contoh kota yang membutuhkan bantuan dari kota-kota lain di sekitarnya seperti Depok, Bekasi, Tangerang, dan Bogor. Pembangunan jalan tol Cibitung – Cilincing ini memiliki ruas sepanjang 34 km melewati

18 Desa di Kabupaten Bekasi. Adapun ruas pembangunan jalan tol Cibitung – Cilincing yang sedang dilaksanakan terdiri dari 4 seksi, yaitu Cibitung – Telaga Asih, Telaga Asih – Tambelang, Tambelang – Tarumajaya, Tarumajaya – Cilincing. Jalan Tol Cibitung – Cilincing merupakan bagian dari perpanjangan pembangunan Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta 2 (JORR 2) yang pembangunannya telah dimulai sejak tahun 2017 (faktabekasi.com). Tol tersebut menghubungkan wilayah Depok – Bekasi menuju Tanjung Priok, maka diharapkan mampu mengurangi jumlah banyaknya angkutan barang dan kendaraan di ruas tol Jakarta – Cikampek. Selain itu juga diharapkan dapat mempersingkat dan mempermudah perjalanan angkutan barang dari kawasan industri yang berada di wilayah Cikarang, Cibitung, Karawang dan sekitarnya menuju Pelabuhan Tanjung Priok. Pelabuhan ini berfungsi sebagai pusat perdagangan terbesar di Indonesia, baik ekspor – impor maupun perdagangan barang antar pulau terutama menuju Jabodetabekpunjur, sebagian Provinsi Banten dan Jawa Barat.

Tanah sangat dibutuhkan untuk membangun infrastruktur, baik sebagai lokasi pembangunan maupun sebagai modal dasar pembangunan tersebut, sepertihalnya membangun Jalan Tol CICIL. Pemerintah membutuhkan tanah yang cukup luas untuk mengakomodasi pertumbuhan penduduk dan untuk mendukung pembangunan demi kepentingan umum. Pemerintah menyadari bahwa pengadaan tanah dan pembangunan tidak akan pernah berakhir. Oleh karena itu, dalam upaya untuk menghubungkan kedua tujuan ini, pemerintah berusaha melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum dan Peraturan Presiden Nomor 71 tahun 2012 mengatur suatu mekanisme dalam pemberian ganti kerugian bagi masyarakat yang berhak dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Bentuk ganti kerugian berupa uang, penetapan besaran ganti kerugian dilakukan oleh *appraisal* dengan mempertimbangkan aspek kerugian fisik juga aspek non fisik yang diakibatkan adanya pengambilan hak atas tanah.

Besaran ganti kerugian yang diterima setiap orang berbeda meski objek tanah tersebut memiliki luasan yang sama bahkan letaknya bersebelahan ataupun berseberangan. Sumardjono (2015, 282) menyatakan bahwa dalam pengadaan tanah pemberian ganti kerugian harus mampu menjamin kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat tidak lebih buruk dari keadaan sebelum tanahnya digunakan pihak lain.

Pada dasarnya setiap pembangunan pasti diharapkan dapat meningkatkan kelestarian lingkungan hidup, kualitas hidup, dan kesejahteraan masyarakat, namun demikian dalam kenyataannya setiap pembangunan tersebut membawa dampak positif dan dampak negatif. Aktivitas pembangunan akan menghasilkan dampak pada manusia maupun lingkungannya. Dampak terhadap manusia yakni meningkat atau menurunnya kualitas hidup manusia, sedangkan dampak bagi lingkungan yakni meningkat atau menurunnya daya dukung alam yang akan mendukung kelangsungan hidup manusia (Zulfikar 2017). Dampak lain dari pembangunan jalan tol yaitu adanya perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat terhadap pihak yang berhak dan masyarakat terdampak.

Berdasarkan data Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi, salah satu desa yang menerima pembayaran ganti kerugian adalah Desa Bunibakti yang terletak di Kecamatan Babelan. Sejumlah dana untuk pembebasan tanah telah dibayarkan sepenuhnya kepada masyarakat yang berhak di Desa Bunibakti pada tahun 2022 tetapi ganti kerugian dalam bentuk uang, tidak langsung dapat menggantikan hilangnya aset penghidupan masyarakat berupa tanah yang menjadi sumber penghidupan. Berkaitan dengan hal tersebut peneliti tertarik melakukan penelitian yang berjudul “Dampak Pemanfaatan Uang Ganti Rugi Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Tol Cibitung - Cilincing Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Pihak Yang Berhak (Studi di Desa Bunibakti Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi)

B. Perumusan Masalah

Pengadaan tanah untuk pembangunan demi kepentingan umum seringkali hanya dilihat dari aspek penyelesaian pembangunan saja. Ketika

kegiatan ini berlangsung, upaya-upaya penghidupan pihak yang berhak sebagai pemilik tanah setelah kehilangan tanahnya untuk pembangunan sering kali diabaikan. Setelah ganti rugi dibayarkan, pemerintah dan masyarakat tidak memiliki hubungan lebih lanjut seperti halnya proyek pembebasan tanah Jalan Tol CICIL (Cibitung - Cilincing). Namun, uang ganti rugi tidak dapat menggantikan hilangnya tanah masyarakat. Kehidupan masyarakat tentu saja berubah karena hal ini, terutama bagi para pihak yang berhak yang kehilangan tanah miliknya sebagai sumber kehidupan. Oleh karena itu, rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pemanfaatan uang ganti rugi oleh pihak yang berhak?
2. Bagaimana dampak pemanfaatan uang ganti rugi terhadap perubahan kondisi sosial ekonomi pihak yang berhak?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian yang ingin dicapai oleh peneliti:

- a. Mengetahui pemanfaatan uang ganti rugi pihak yang berhak (produktif atau konsumtif).
- b. Mengetahui dampak pemanfaatan uang ganti rugi terhadap perubahan kondisi sosial ekonomi pihak yang berhak.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan Penelitian terdiri dari 2 aspek, yaitu aspek akademis dan aspek praktis :

a. Kegunaan Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dalam hal mengungkapkan perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat setelah pemberian ganti kerugian karena adanya pengadaan tanah untuk jalan tol. Penelitian ini diharapkan memberikan gambaran informasi mengenai kondisi sosial ekonomi pihak yang berhak di Desa

Bunibakti atas objek pengadaan tanah untuk pembangunan Jalan Tol Cibitung – Cilincing setelah pemberian ganti kerugian.

b. Kegunaan Praktis

1) Kegunaan bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan memberikan gambaran informasi mengenai kondisi sosial ekonomi pihak yang berhak di Desa Bunibakti atas objek pengadaan tanah untuk pembangunan Jalan Tol Cibitung – Cilincing setelah pemberian ganti kerugian.

2) Kegunaan bagi Kementerian ATR/BPN

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dalam hal langkah-langkah merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum khususnya bagi kehidupan masyarakat yang terkena dampak langsung pembangunan untuk kehidupan di masa yang akan datang.

3) Kegunaan bagi Masyarakat

Memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang perubahan kondisi sosial ekonomi dan pemanfaatan uang ganti rugi pengadaan jalan tol.

BAB VII PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan, kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pihak yang berhak cenderung memanfaatkan uang ganti rugi untuk tujuan produktif dibandingkan tujuan konsumtif. Pemanfaatan untuk tujuan produktif antara lain: pembelian tanah pertanian membeli tanah dan dibangun kembali dan membuat usaha baru. Sedangkan pemanfaatan untuk tujuan konsumtif antara lain: perbaikan rumah tinggal, pembelian kendaraan dan pendaftaran haji serta umroh.
2. Dampak perubahan kondisi sosial ekonomi setelah pemanfaatan uang ganti rugi pengadaan tanah adalah sebagai berikut:
 - a. Dampak pada pekerjaan yaitu masih ada yang focus pada pekerjaan sebelum pemanfaatan uang ganti rugi serta terjadinya perubahan pekerjaan petani menjadi wiraswasta, pedagang, peternak dan menjadi tidak bekerja setelah pemberian uang ganti rugi.
 - b. Dampak pada pendidikan yaitu peningkatan kemampuan informan dalam pembiayaan pendidikan anak hingga ke jenjang perguruan tinggi. Tingkat pendidikan para informan tidak memiliki pengaruh lebih terhadap cara mereka memanfaatkan uang ganti rugi, baik untuk tujuan konsumtif maupun produktif.
 - c. Dampak pada pendapatan yaitu terjadinya peningkatan pendapatan per bulan dan penurunan pendapatan. Peningkatan pendapatan, terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab utamanya. Sebagian dari mereka menggunakan uang ganti rugi yang diterima dari pengadaan tanah sebagai modal untuk memulai usaha baru atau memperbesar usaha yang sudah ada.
 - d. Dampak pada kepemilikan harta benda yaitu rumah tinggal informan yang menjadi lebih baik dengan kondisi bangunan permanen. Peningkatan juga terjadi pada kepemilikan kendaraan roda dua dan empat, serta peralatan elektronik.

B. Saran

1. Dalam proses pengadaaan tanah pelaksana pengadaaan tanah dari Kantor Pertanahan dapat menghimbau masyarakat yang berhak agar memanfaatkan uang ganti kerugian untuk kebutuhan produktif yang sifatnya jangka panjang dibandingkan kebutuhan konsumtif.
2. Pemerintah hendaknya melakukan monitoring dan sosialisasi kepada masyarakat dengan tujuan untuk peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) agar masyarakat mampu mengelola uang ganti kerugian untuk keberlanjutan usaha, dengan dibentuknya suatu organisasi yang bisa menampung aspirasi masyarakat untuk membuka usaha.
3. Pemerintah hendaknya memberikan kebijakan yang mendukung, pelatihan yang memadai, dan akses yang mudah terhadap sumber daya dan informasi. Dengan demikian, uang ganti rugi yang diterima oleh masyarakat dapat benar-benar menjadi alat yang efektif untuk memajukan kesejahteraan dan keberlanjutan sosial ekonomi di Desa Bunibakti.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifah, NF 2016. Kajian dampak pembangunan ruas tol Mojokerto-Kertosono terhadap kelangsungan mata pencaharian dan pendapatan masyarakat kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto.
- Ambararum, S 2021. Pemanfaatan uang ganti rugi lahan pertanian oleh keluarga petani (studi kasus keluarga petani yang mendapat uang ganti rugi akibat pembangunan dari pemerintah di Desa Purworejo, Kecamatan Pilangkenceng, Kabupaten Madiun). In Prosiding Seminar Nasional Ekonomi Pembangunan (Vol. 1, No. 6, pp. 673-678).
- Anisa, K., Prasetyo, P. K., & Pujiriyani, D. W 2021. Dampak Pengadaan Tanah Jalan Tol Trans Sumatera pada Kondisi Penghidupan Masyarakat di Desa Serdang. *Tunas Agraria*, 4(3), 340-351.
- Arifin, Zaenal 2002. Kondisi Sosial Ekonomi Petani Tebu di Desa Negara Batin Sungkai Selatan. Bandar Lampung: UNILA.
- Baiquni, M 2007, Strategi penghidupan di masa krisis, Ideas Media, Yogyakarta.
- Basrowi, dkk. 2010. Analisis Kondisi Sosial Ekonomi dan Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Srigading, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur, *Jurnal Ekonomi dan Pendidikan*, Vol. 7 Nomor 1.
- Budiyarto, Eko 2021. Dampak Sosial Ekonomi Pembangunan Jalan Lintas Selatan (JLS) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Wonogiri (Studi Penelitian di Kec. Giriwoyo). Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
- Dewitasari, T. (2016). Dampak Pembangunan Jalan Tol Surabaya-Mojokerto Terhadap Kondisi Sosial dan Ekonomi Penduduk Di Daerah Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik. *Swara Bhumi e-Journal Pendidikan Geografi FIS Unesa*, 1(1), 197-207.
- Gunanegara. 2008. Rakyat dan Negara dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan. PT Nusa Tata: Jakarta.
- Gunawan, Imam 2015, Metode penelitian kualitatif, teori dan praktik, Bumi Aksara, Jakarta.
- Hamdi, SA & Bahruddin, E 2014, Metode penelitian kuantitatif aplikasi dalam pendidikan, Deepublish, Yogyakarta
- Harun M. Husein, 2011, Berbagai aspek hukum analisis mengenai dampak lingkungan, Yogyakarta, Bumi aksara.
- Hazmi, Alwan. 2015. Perubahan Spasial Akibat Pembangunan Jalan Lingkar Selatan Kota Salatiga. Jurusan Geografi, Fakultas Ilmu Sosial: Universitas Negeri Semarang.

- Hidayat, Y 2017, 'Analisis Dampak alih fungsi tanah pertanian terhadap rumah tangga petani (studi kasus Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka)', Thesis Institut Pertanian Bogor.
- Indikator Kesejahteraan Rakyat 2023 Badan Pusat Statistik, 2023
- Keputusan Dirjen Kementerian Keuangan 2020
- Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas 2021, Laporan KPPIP Semester I 2021:2021
- M. Sastropradja. 2000. Status Sosial Masyarakat. Jakarta: Karya Pustaka
- Malo, Manaso 2001. Kedudukan Sosial Ekonomi Masyarakat. Jakarta: Rajawali.
- Maurits 2012, Selintas Tentang Kelelahan Kerja, Amara Book, Yogyakarta.
- Mulyanto 2001. Aspek Sosial Ekonomi dalam kaitan Kesejahteraan Masyarakat. Jakarta: Rajawali Press.
- Mustapita, AF & Mohammad R 2017, 'Analisis Pola Penggunaan Remitan Migrasi Internasional secara Produktif dan Konsumtif di Kabupaten Malang', Jurnal Ketahanan Pangan, vol 1, no.2,
- Mustikawati, F., & Faizah, A 2016. Analisa fungsi pemanfaatan uang rumah tangga di desa Manyarejo Kec. Manyar Kab. Gresik dari ganti rugi lahan dan reklamasi Java Integrated Industrial And Ports Estate.
- Poetri, S. R. A., & Rijanta, R. R 2019. Pola Pemanfaatan Uang Ganti rugi Lahan oleh Masyarakat Terdampak Pembangunan Yogyakarta International Airport. Jurnal Bumi Indonesia, 8(3).
- Prayoko 2019. Pelaksanaan Ganti Kerugian Pengadaan Tanah Pelabuhan Ujung Jabung Dan Implikasi Ganti Rugi (Studi Di Desa Sungai Itik, Kecamatan Sadu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur).
- Rohma, N. 2017. Evaluasi Dampak Sosial Ekonomi Pelaksanaan Kebijakan Pengadaan Tanah Proyek Pembangunan Pelabuhan Internasional Jiipe (Java Integrated Industrial And Port Estate) Di Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik (Doctoral dissertation, Universitas Airlangga).
- Salim. 2002. Kosep Sosiologis Manusia Sebagai Makhluk Sosial. Jakarta: CV Karyajaya.
- Saragih, S, Lassa, J & Ramli, A 2007, Kerangka penghidupan berkelanjutan
- Sitorus, O., & Limbong, D. 2004. *Pengadaan tanah untuk kepentingan umum*. Mitra Kebijakan Tanah Indonesia.
- Sudirman, S 2014, 'Pembangunan jalan tol di indonesia: kendala pembebasan tanah', Jurnal Bhumi, vol 4, no.40, hlm.522

- Sugiyono 2019, Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D, Penerbit Alfabeta, Bandung.
- Sumardi 2001. Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat.. Yogyakarta/; Suara Media.
- Sumardjono, MSW 2015, Dinamika pengaturan pengadaan tanah di Indonesia : dari keputusan presiden sampai undang-undang, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta
- Sumartono 2002, Terperangkap dalam Iklan, Alfabeta , Bandung
- Swela, A., Santosa, E., & Manar, D. (2017). Analisis dampak pembebasan tanah dan nilai ganti rugi terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat dalam pembangunan Waduk Logung di Desa Kandangmas dan Desa Tanjungreja Kabupaten Kudus. *Journal of Politic and Government Studies*, 6(2), 41-50.
- Umyati, S., & Sendjaja, T. 2019. Faktor-faktor yang mempengaruhi petani dalam pengalokasian dana ganti rugi konversi lahan pertanian. *Agricore Jurnal Agribisnis dan Sosial Ekonomi UNPAD*, 4, 622-631.
- Verlani, S. A. (2024). Pemanfaatan Uang Ganti Kerugian Pengadaan Tanah Jalan Tol Solo-Jogja Dan Potensi Dampaknya Terhadap Kondisi Perekonomian Keluarga Pihak Yang Berhak (Studi Di Desa Pepe, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten) (Doctoral dissertation, Sekolah Tinggi Pertanian NASional).
- Wahyu Prabowo Putra 2014. Pemanfaatan Uang Ganti Rugi Lahan Pertanian (Studi Kasus Pembangunan Jalan Tol di Desa Kedunglosari, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang)
- Wangke, W.M. 2011. Dampak Sosial Ekonomi Kegiatan Pembangunan Proyek Lapangan Uap dan PLTP di Modayag Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
- Zulfikar, W 2017, 'Dampak sosial, ekonomi, dan politis dalam pembangunan Bandara Udara Kertajati di Kabupaten Majalengka', Caraka Prabu, vol. 1, nomor 1, hlm. 58-77.

Peraturan Perundang - Undangan

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
- Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
- Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum